KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR semangati kementerian LHK, Ayo lawan resolusi parlemen Eropa atas minyak sawit kita
Tanggal : Selasa, 24 April 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Semangati Kementerian LHK

Ayo, Lawan Resolusi Parlemen Eropa Atas Minyak Sawit Kita!

DPR mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk melakukan perlawanan terhadap resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit Indonesia. Sebab, resolusi tersebut menimbulkan kerugian besar dan merupakan bentuk tindakan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Assegaf, kerugian atas resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit tidak hanya bagi pelaku industri. Para petani dan 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupan pada kelapa sawit juga dirugikan dengan resolusi tersebut.

"Alasan utama resolusi tersebut hanya berdasarkan opini di Eropa. Kelapa sawit disebut sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis, seperti Indonesia," ujarnya saat menjelaskan hasil kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral DPR dengan Uni Eropa, di Ruang Pers Parlemen, Senayan, kemarin.

Saat ini, sambung politisi Partai Demokrat ini, Parlemen Uni Eropa sedang melakukan pembahasan lanjutan tentang resolusi tersebut. DPR telah mendesak Parlemen Uni Eropa tidak bersikap diskriminatif, karena pengesampingan kelapa sawit dari daftar komoditas pertanian sumber energi terbarukan hanya didasarkan pada kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

"Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang kontradiktif. Hal ini merusak upaya kedua belah pihak dalam mewujudkan kerja sama ekonomi yang lebih baik," ucapnya.

Anggota BKSAP Fadel Muhammad ikut bicara. Politisi senior Partai Golkar ini meminta Pemerintah meninjau ulang perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Kerja sama itu harus dihentikan jika Parlemen Uni Eropa tidak menghentikan kampanye negatif terhadap komoditas sawit dari Indonesia.

"Kalau Uni Eropa melakukan kampanye negatif melalui LSM Indonesia, Indonesia juga harus berani membuat tindakan tegas. Kalau perlu, hentikan saja pembelian barang dari Uni Eropa. Indonesia bisa membeli barang-barang di tempat lain jika sikap Parlemen Uni Eropa seperti itu. Kalau mereka keras, Parlemen Indonesia juga bisa keras demi kepentingan rakyat Indonesia," tutur dia.

Menurut Fadel, dari kunjungan ke Uni Eropa, pihaknya memperoleh tiga kesimpulan. Pertama, kampanye negatif soal produk minyak sawit Indonesia dilakukan LSM Indonesia yang mendapat pendanaan dari pengusaha Uni Eropa. Kedua, kampanye yang dilakukan LSM tersebut juga memberikan dampak negatif pada perkembangan politik nasional. Ketiga, kampanye negatif itu harus dilawan dengan kampanye negatif juga.

"Banyak LSM di Indonesia yang mendapat dana dari Uni Eropa untuk mengkhianati bangsa sendiri. Kami akan membicarakan ini dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kami akan minta PPATK mengungkap LSM apa saja dan berapa uang yang digelontarkan oleh Uni Eropa untuk LSM-LSM tersebut," tandasnya.

Pada 7-13 April kemarin, BKSAP melakukan kunjungan ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia. Tujuan utama dari kunjungan itu untuk memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia agar kembali diterima di pasar Eropa. ■ ONI